

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari analisa berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa keberhasilan implementasi PIPPK di Kelurahan Hegarmanah dipengaruhi faktor-faktor berikut:

##### 1. Sumber daya

Dari sumber daya segi anggaran, yang dimana anggaran serapan tersebut menunjukkan serapan yang besar dengan total angka 84.55% dari seluruh anggaran yang diberikan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran PIPPK tahun 2019 di Kelurahan Hegarmanah besar yang menandakan partisipasi Aparatur kewilayahan dan LKK di Kelurahan Hegarmanah baik dalam melaksanakan PIPPK. Akan tetapi dari segi sumber daya manusia dari tingkat partisipasi masyarakat dalam PIPPK tidak begitu meningkat karena kesibukan dan satu lain hal yang dialami masyarakat keseluruhan. Maka demi tetap berjalannya program PIPPK setiap elemen yang terlibat sepakat untuk memakai pihak ketiga sebagai jasa dalam pembangunan infrastruktur didalam program PIPPK.

##### 2. Disposisi

Dari disposisi menyorot pada dua elemen yakni kognitif dan afektif. Kognitif adalah pengetahuan implementators yang dasarnya tentu telah memahami Juknis PIPPK dan afektif rasa kemauan kedua belah pihak antara Aparatur Kewilayahan dan LKK memahami apa yang harus

dilakukan dalam melaksanakan PIPPK, tentu dengan berpedoman pada Juknis PIPPK dan sosialisasi yang baik antar kedua belah pihak.

### 3. Komunikasi

Dari komunikasi menyortir 3 hal penting yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi yang dilakukan dengan cara mengundang anggota LKK datang ke kantor Kelurahan secara formal dan non informal dilapangan tentu diiringi kejelasan apa maksud tujuan sasaran serta substansi dari program PIPPK yang diterapkan dan konsistensi agar program yang diterapkan tidak salah sasaran.

### 4. Struktur birokrasi

Dari Struktur birokrasi indikator nya adalah SOP yaitu Juknis PIPPK tersendiri yang sangat membantu untuk melaksanakan PIPPK sebagaimana mestinya dengan baik. Menandakan fungsi Juknis PIPPK sebagai SOP yang sangat membantu untuk pelaksanaan kegiatan bagi Aparatur Kewilayahan dan LKK dan tidak menjadi kendala bagi implementors kebijakan/program PIPPK tersebut.

## 6.2 Saran

Untuk kinerja LKK dari temuan dimensi sumber daya manusia sudah baik dan kooperatif akan tetapi warga masyarakat yang perlu dipacu agar berpartisipasi secara aktif untuk keberlangsungan program PIPPK ini yang seharusnya melanjutkan tradisi gotong royong. Bentuk konkritnya agar terpacu lebih aktif dalam keberlangsungan program seperti memberikan award dalam bentuk apapun kepada individu/kelompok masyarakat.

Untuk Aparatur Kewilayahan Dan LKK berdasarkan temuan dimensi komunikasi cukup baik akan tetapi masih harus dibenahi agar meminimalisir kesalahan pahaman walaupun kesalahan pahaman tersebut dapat dibenahi alangkah baiknya tidak terjadi karena demi kelancaran pelaksanaan PIPPK tersendiri, seperti menkonfirmasi dulu kepada satu sama lain.

Untuk Aparatur kewilayahan dan LKK Dari segi hal lainnya perlu dipertahankan atau ditingkatkan antara internal Aparatur Kewilayahan maupun LKK yang tentu tujuan agar PIPPK ini selalu terlaksana dengan baik dari tahun ke tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU :**

*Abraham Kaplan, Harold dan Lanswell, Power and Society. (New Heaven : Yale University Press, 1970) Hal. 71*

*Arikunto, Manajemen Penelitian.(Jakarta: Rineka Cipta, 2005) Hlm. 88*

*Friedrich dalam Agustino Leo, Dasar-dasar Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2008) Hlm.7*

*George, C. Edwards III. (1980). Implementing Public Policy. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.*

*John W Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions. (California: Sage Publication, 1998) Hlm. 65*

*Prof, Dr. Budi Winarno, MA, Kebijakan Publik, teori, dan Proses, (Jakarta: Media Pressindo,2007) hlm. 32*

*Riant Nugroho, Public Policy “Dinamika Kebijakan, Analsis Kebijakan, Manajemen Kebijakan”, (Jakarta, Pt. Elex Media Komputindo, 2009) Hlm. 36*

*Sugiyono “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, (Bandung. Alfabeta. 2008*

*Thomas R Dye dalam Nugroho, Kebijakan Publik.(Jakarta: PT Elex Media komputindo, 2003) Hlm. 3*

*Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama,2012)*

### **E-Journal :**

*AyoBandung.com, Kecamatan Cidadap Bandung Inovasi Lewat Kecipring dan Goni, LIPUTAN6, <https://www.liputan6.com/regional/read/3901259/kecamatan-cidadap-bandung-inovasi-lewat-kicipring-dan-goni>*

Aunu Rofiq Djaelani, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif", dalam <http://www.e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan/article/download/55/64>

Chambers 1995 yang dikutip oleh Munawan Noor, mengenai Pemberdayaan Masyarakat, <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/viewFile/591/541>

Dede Suherlan, PIPPK Kota Bandung Jadi Referensi Berbagai Wilayah, Jabar News, <https://jabarnews.com/read/51402/>

Daniel L. Stufflebeam, 1971, 'The Relevance of The CIPP Evaluation Model for Educational Accountability', Ohio State Univ., Colombus, Hal.3-4 diakses dari <https://eric.ed.gov/>

Mushaf Isnain Perdana, Implementasi Peraturan Walikota Kota Bandung No.281 Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2015 (Studi Kasus : Kecamatan Panyileukan), Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Parahyangan, 2012, hlm 18

Mudjia Raharjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif", Universitas Islam Negeri Malang, 2010, diakses dari <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/270-triangulasi-dalampenelitian-kualitatif.html>

Ofik Farurozi, Pemkot Bandung Gelar Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018, SINARPAGINEWS, <http://m.sinarpaginews.com/ekonomi/12824/pemkot-bandung-gelar-pemberdayaan-masyarakat-tahun-2018.html>

, Pengertian Kebijakan Menurut ahli, <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>

Sudijono yang dikutip oleh Setiawati. Ami, 2012, Evaluasi Program Transjakarta dalam Upaya Perbaikan Transportasi Publik di Jakarta, Universitas Indonesia; Depok, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20308956-Spdf-Ami%20Setiawati.pdf>

## **Peraturan :**

Juknis PIPPK Tahun 2015

Peraturan Wali Kota Bandung No. 436 Tahun 2015 BAB 2 Pasal II

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem  
Perencanaan Pembangunan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 16*